



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2025**



**PANGKALPINANG  
TAHUN 2025**



**[kukm.babelprov.go.id](http://kukm.babelprov.go.id)**  
**-[kukm@babelprov.go.id](mailto:kukm@babelprov.go.id)-**

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2). Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah memuat Evaluasi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun berjalan, masalah dan kendala yang dihadapi atau ketercapaian target program, kegiatan, dan usulan program serta kegiatan hasil evaluasi. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama perubahan RKPD.

Adapun Penyusunan Renja perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
2. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Tentang RKPD.
3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan (APBD, APBN dan sumber lainnya).
4. Evaluasi Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rancangan Perubahan Renja ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan menjadi acuan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri F);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 seri A);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, serta menyesuaikan suatu kondisi yang tidak lagi relevan dengan perencanaan yang telah dilakukan antara lain tidak sesuai asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas serta diperlukannya penyesuaian dengan tujuan, sasaran dan Program Prioritas Gubernur 2024-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triwulan I (Maret 2025);
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### 1.4 **Sistematika Dokumen Rancangan Perubahan Renja**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

##### **BAB II   Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan I tahun 2025**

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

##### **BAB III   Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD**

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

##### **BAB IV   Penutup**

Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

#### 1.4 **Sistematika Dokumen Rancangan Perubahan Renja**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I    Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

##### **BAB II    Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan I tahun 2025**

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

##### **BAB III   Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD**

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

##### **BAB IV    Penutup**

Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja merupakan salah satu acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 8 (delapan) program dengan 15 (lima belas) kegiatan, 7 program di Dinas dan 1 program di UPTD Balai koperasi dan UKM. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 26.329.945.013,- dan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 1.534.921.300,-, Total Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 27.864.866.313,-. Namun pada periode bulan Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025, maka ada beberapa anggaran yang disesuaikan dalam rangka efisiensi belanja dengan total pagu menjadi 25.642.533.953,-. Adapun Program/kegiatan/Sub kegiatan yang disesuaikan anggarannya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah anggaran semula sebesar Rp. 15.852.556.713,- disesuaikan menjadi Rp 15.078.467.053,-
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran semula sebesar Rp. 179.970.200,- disesuaikan menjadi Rp 147.972.400,-
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran semula sebesar Rp 9.926.365.588,- disesuaikan menjadi Rp 9.781.365.578,-
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran semula sebesar Rp 42.000.000,- disesuaikan menjadi Rp 20.000.000,-
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran semula sebesar Rp 993.317.000,- disesuaikan menjadi Rp 744.748.150,-
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran semula sebesar Rp 1.948.921.300,- disesuaikan menjadi Rp 1.718.296.300,-
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran semula sebesar Rp 2.078.934.625,- disesuaikan menjadi Rp 2.190.634.625,-

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran semula sebesar Rp 683.048.000,- disesuaikan menjadi Rp 475.450.000,-.
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam anggaran semula sebesar Rp 49.898.350,- disesuaikan menjadi Rp 32.774.100,-
  - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 49.898.350,- disesuaikan menjadi Rp 32.774.100,-.
- 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi anggaran semula sebesar Rp 74.997.700,- disesuaikan menjadi Rp 45.286.600,-
  - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 49.997.750,- disesuaikan menjadi Rp 32.686.700,-.
  - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 24.999.950,- disesuaikan menjadi Rp 12.599.900,-.
- 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi anggaran semula sebesar Rp 157.999.900,- disesuaikan menjadi Rp 118.685.050,-
  - Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 157.999.900,- disesuaikan menjadi Rp 118.685.050,-.
- 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian anggaran semula sebesar Rp 2.083.750.250,- disesuaikan menjadi Rp 1.663.889.950,-
  - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 2.083.750.250,- disesuaikan menjadi Rp 1.663.889.950,-.
- 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi anggaran semula sebesar Rp 717.101.700,- disesuaikan menjadi Rp 583.442.700,-
  - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 717.101.700,- disesuaikan menjadi Rp 583.442.700,-.
- 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) anggaran semula sebesar Rp 3.879.958.800,- disesuaikan menjadi Rp 3.421.400.900,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan anggaran semula sebesar Rp 3.879.958.800,- disesuaikan menjadi Rp 3.421.400.900,-.
- 8. Program Pengembangan UMKM anggaran semula sebesar Rp 5.048.602.900,- disesuaikan menjadi Rp 4.698.587.600,-.

- Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah anggaran semula sebesar Rp 5.048.602.900,- disesuaikan menjadi Rp 4.698.587.600,-.

Realisasi program/kegiatan target kinerja hasil yang direncanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 179.970.200,- realisasi sebesar Rp. 26.973.768,- atau 14,99%.
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 9.926.365.588,- realisasi sebesar Rp. 2.456.130.408,- atau 32,88%.
  - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 993.317.000,- realisasi sebesar Rp. 157.866.195,- atau 18,90%.
  - e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 1.948.921.300,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  - f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 2.078.934.625,- realisasi sebesar Rp. 413.276.557,- atau 24,92%.
  - g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; jumlah anggaran sebesar Rp. 683.048.000,- realisasi sebesar Rp. 59.099.000,- atau 9,47%.
2. Program Pelayanan ijin Usaha Simpan Pinjam;
  - a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 49.898.350,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.  
Sub Kegiatan terdiri dari:
    1. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 49.898.350,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  - a) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 49.997.750,- realisasi sebesar Rp. 11.858.305,- atau 31,09%.  
Sub Kegiatan terdiri dari:
    1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi; jumlah anggaran sebesar Rp. 49.997.750,- realisasi sebesar Rp. 11.858.305,- atau 31,09%.
  - b) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1(satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 24.999.950,- realisasi sebesar Rp. 4.925.000,- atau 24,53%.

Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 24.999.950,- realisasi sebesar Rp. 4.925.000,- atau 24,53%.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 157.999.900,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan; jumlah anggaran sebesar Rp. 157.999.900,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 2.083.750.250,- realisasi sebesar Rp. 68.459.700,- atau 3,40%.

Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi; jumlah anggaran sebesar Rp. 2.083.750.250,- realisasi sebesar Rp. 68.459.700,- atau 3,40%.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

- a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 717.101.700,- realisasi sebesar Rp. 8.815.030,- atau 1,24%.

Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi; jumlah anggaran sebesar Rp. 287.779.850,- realisasi sebesar Rp. 4.205.030,- atau 1,48%.
2. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 278.321.850,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
3. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; jumlah anggaran sebesar Rp. 151.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.610.000,- atau 3,15%.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM);

- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para

Pemangku Kepentingan; jumlah anggaran sebesar Rp. 3.879.958.800,- realisasi sebesar Rp. 37.026.314,- atau 0,96%.

Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan; jumlah anggaran sebesar Rp. 2.275.948.750,- realisasi sebesar Rp. 37.026.314,- atau 1,65%.
  2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan; jumlah anggaran sebesar Rp. 161.489.850,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  3. Pemulihan Usaha-Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 427.412.250,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  4. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jumlah anggaran sebesar Rp. 99.999.800,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  5. Penyusunan Basis Data Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 372.999.850,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  6. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 185.999.250,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  7. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik; jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  8. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 36.428.350,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  9. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha; jumlah anggaran sebesar Rp. 192.300.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
  10. Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 27.380.700,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
8. Program Pengembangan UMKM;
- a) Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah; jumlah anggaran sebesar Rp. 5.048.602.900,- realisasi sebesar Rp. 40.585.360,- atau 0,81%.
- Sub Kegiatan terdiri dari:
1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi; jumlah anggaran sebesar Rp. 3.630.318.200,- realisasi sebesar Rp. 16.870.000,- atau 0,47%.
  2. Pengembangan Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 456.142.000,- realisasi sebesar Rp. 3.555.000,- atau 0,79%.
  3. Fasilitasi Pengembangan Inkubasi secara Terpadu dan Berjenjang; jumlah anggaran sebesar Rp. 274.572.700,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

4. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan; jumlah anggaran sebesar Rp. 524.570.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
5. Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil; jumlah anggaran sebesar Rp. 163.000.000,- realisasi sebesar Rp. 120.160.360,- atau 14,11%.

**Formulir Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sid Tahun 2025		
						I	II	III	IV					
	<b>Semua Bidang</b>													
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				15.852.556.713			3.113.345.931	-	-	-	3.113.345.931	19,64%	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	-	0,00	13	179.970.200	2	26.973.768	-	-	-	26.973.768	15,38%	26.973.768
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	7	155.470.200	-	26.973.768				26.973.768	17,35%	26.973.768
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	0,00	18	24.500.000	7	-				-	38,89%	0,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan keuangan (laporan)	-	0,00	4	9.926.365.588	1	2.456.130.411	-	-	-	2.456.130.411	24,74%	2.456.130.411
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	-	0,00	53	9.926.365.588	53	2.456.130.411			13	2.456.130.411	24,74%	2.456.130.411
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan kepegawaian (laporan)	-	0,00	4	42.000.000	1	-			-	-	25%	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Jumlah	Anggaran	I	II	III	IV	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	0,00	20	42.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi Dinas (laporan)	-	0,00	4	993.317.000	1	157.866.195	-	-	-	157.866.195	25%	15,89%	0,00	157.866.195
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	57.726.000	-	11.565.500	-	-	-	11.565.500	0,00%	20,04%	0,00	11.565.500
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	141.921.600	-	32.265.300	-	-	-	32.265.300	0,00%	22,73%	0,00	32.265.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	36.732.200	-	4.370.800	-	-	-	4.370.800	0,00%	11,90%	0,00	4.370.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	143.844.000	-	22.908.200	-	-	-	22.908.200	0,00%	15,93%	0,00	22.908.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	0,00	1	13.200.000	-	1.575.000	-	-	-	1.575.000	0,00%	11,93%	0,00	1.575.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	104.893.200	-	21.581.300	-	-	-	21.581.300	0,00%	20,57%	0,00	21.581.300

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
							I	II	III	IV						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	0,00	1	46.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	1	449.000.000	63.600.095	-	-	-	63.600.095	-	0,00%	14,16%	0,00	63.600.095
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang Dinas (laporan)	-	0,00	1	1.948.921.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	0,00	1	29.989.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	7	658.056.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	6	1.260.875.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Dinas (laporan)	-	0,00	4	2.078.934.625	413.276.557	-	-	-	413.276.557	-	25%	19,88%	0,00	413.276.557
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	0,00	1	23.284.500	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	0,00%	12,88%	0,00	3.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		
							I	II	III	IV							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	1	439.931.125	43.812.557					-	43.812.557	0,00%	9,96%	0,00	43.812.557
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	1	7.335.000	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	1	1.608.384.000	366.464.000					-	366.464.000	0,00%	22,78%	0,00	366.464.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) (Laporan)	-	0,00	4	683.048.000	59.099.000					-	59.099.000	25%	8,65%	0,00	59.099.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	0,00	1	56.700.000	5.275.200					-	5.275.200	0,00%	9,30%	0,00	5.275.200

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Jumlah	Anggaran	I	II	III	IV		0,00%	13,32%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	0,00	3	210.204.000	-	27.993.800				0,00%	13,32%	0,00	27.993.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	0,00	3	286.484.000	-					0,00%	0,00%	0,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	0,00	10	129.660.000	-	25.830.000				0,00%	19,92%	0,00	25.830.000
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				15,65%	19,64%	
									<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		-	-	-	49.898.350	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi (Izin Usaha)	-	0,00	3	49.898.350	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-





No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025
						I	II	III	IV		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				2.083.750.250	68.459.700	-	-	-	68.459.700		3,29%	68.459.700
	Pendidikan dan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen administrasi penyelenggaraan perkoperasian Jumlah Dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan Perkoperasian Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat (dokumen 2 dokumen 780 orang)	-	0,00	2.083.750.250	68.459.700	-	-	-	68.459.700	0,00%	3,29%	68.459.700
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	* Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	-	0,00	2.083.750.250	68.459.700	15			68.459.700	2,00%	3,29%	68.459.700
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,29%</b>	
										<b>Predikat Kinerja</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				717.101.700	8.815.030	-	-	-	8.815.030		1,23%	8.815.030



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025				
					Target	Anggaran	I	II	III	IV							
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	-	0,00	-	600	3.630.318.200	25	16.870.000					0,00	16.870.000		
	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	0,00	-	30	456.142.000	-	3.555.000					0,00%	0,78%	0,00	3.555.000
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	0,00	-	2	274.572.700	-	-					0,00%	0,00%	0,00	-
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasaha yang Difasilitasi (Orang)	-	0,00	-	153	524.570.000	-	-					0,00%	0,00%	0,00	-
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	0,00	-	7	163.000.000	-	20.160.360					0,83%	12,37%	0,00	20.160.360
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0,00%	0,80%					
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>27.864.866.313</b>		<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>8,91%</b>	<b>11,79%</b>					
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>					

# BENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

## BAR III

### 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi selama pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam DPPA Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sudah sesuai dengan rasionalisasi yang diharapkan. Perubahan Belanja Operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penyesuaian pagu anggaran baik itu pengurangan maupun penambahan pagu per kegiatan.

Perubahan program/kegiatan dalam DPA Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji dalam tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel. 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan			
			Angka	Satuan				Angka	Satuan				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Sakip PD</b>	<b>73,10</b>		<b>15.852.556.713</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Sakip PD</b>	<b>75,85</b>		<b>15.852.556.713</b>			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13	Dokumen	179.970.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13	Dokumen	176.422.400			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	155.470.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	162.122.400			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan	24.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan	14.300.000			
		Nilai Survey Internal Perangkat Daerah	83,95	persen			Nilai Survey Internal Perangkat Daerah	83,95	persen				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan keuangan (laporan)	4	Laporan	9.926.365.588	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan keuangan (laporan)	4	Laporan	9.781.365.578			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/Bulan	9.926.365.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/Bulan	9.781.365.578			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan kepegawaian	4	Laporan	42.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan kepegawaian	4	Laporan	20.000.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	42.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	20.000.000			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan administrasi Dinas	4	Laporan	993.317.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pelayanan administrasi Dinas	4	Laporan	823.860.950			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.726.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.726.000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	141.921.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	124.889.700			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	36.732.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	39.845.000			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	143.844.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	86.307.050			

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	
			Angka	Satuan				Angka	Satuan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	13.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	13.200.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	104.893.200	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	104.893.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	46.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	46.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	449.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	351.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan pengadaan barang Dinas	1	Laporan	1.948.921.300	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan pengadaan barang Dinas	1	Laporan	1.666.661.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (	1	Paket	29.989.500	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (	1	Paket	29.989.500	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	658.056.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	740.859.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	1.260.875.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	895.812.500	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Dinas	4	Laporan	2.078.934.625	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Dinas	4	Laporan	2.190.634.625	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	23.284.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	23.284.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	439.931.125	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	439.931.125	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.335.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.335.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.608.384.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.720.084.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4	Laporan	683.048.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4	Laporan	472.897.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	56.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.400.000	

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan			
			Angka	Satuan				Angka	Satuan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	210.204.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	121.001.200			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	286.484.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	171.836.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	129.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	129.660.000			
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi	3	persen	49.898.350	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase koperasi usaha simpan pinjam	7,20	persen	32.774.100			
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	3	ljin Usaha	49.898.350	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	3	ljin Usaha	32.774.100			
	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	3	Unit Usaha	49.898.350	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	3	Unit Usaha	32.774.100			
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20	persen	74.997.700	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	25,60	persen	45.286.600			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Koperasi	49.997.750	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Koperasi	32.686.700			
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	23	Unit Usaha	49.997.750	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	23	Unit Usaha	32.686.700			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	Koperasi	24.999.950	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	Koperasi	12.599.900			
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	13	Unit Usaha	24.999.950	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	13	Unit Usaha	12.599.900			

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	
			Angka	Satuan				Angka	Satuan		
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai	67	persen	157.999.900	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	7,20	persen	118.685.050	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	Koperasi	157.999.900	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	Koperasi	118.685.050	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15	Unit Usaha	157.999.900	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15	Unit Usaha	118.685.050	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih	0,288	persen	2.083.750.250	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM koperasi yang diberikan dukungan pelatihan	0,159	persen	1.163.889.900	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen administrasi penyelenggaraan pelatihan perkoperasian Jumlah Dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan Perkoperasian Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat	1	Dokumen	2.083.750.250	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen administrasi penyelenggaraan pelatihan perkoperasian Jumlah Dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan Perkoperasian Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat	1	Dokumen	1.163.889.900	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	750	Orang	2.083.750.250	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	750	Orang	1.163.889.900	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang diberdayakan	9	persen	717.101.700	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang diberdayakan	7,20	persen	1.006.442.700	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Koperasi	717.101.700	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Koperasi	1.006.442.700	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5	Kelompok Masyarakat	287.779.850	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5	Kelompok Masyarakat	650.317.300	
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	5	Unit Usaha	278.321.850	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	5	Unit Usaha	232.793.200	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	5	Unit Usaha	151.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	5	Unit Usaha	123.332.200	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan
			Angka	Satuan			Angka	Satuan	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang Diberdayakan	0,56	persen	3.879.958.800	Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal	0,13	Persen	3.421.391.950
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemuktahiran data dan penguatan kelembagaan UMKM Jumlah UMKM yang bernitra	1	Dokumen	3.879.958.800	Jumlah UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal	26.890	Unit usaha	3.421.391.950
	Menumbuhkan/embangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	700	Unit Usaha	2.275.948.750	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	700	Unit Usaha	2.493.182.050
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150	Orang	161.489.850	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150	Orang	72.476.000
	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	35	Unit Usaha	427.412.250	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	35	Unit Usaha	0
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	100	Unit Usaha	99.999.800	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	100	Unit Usaha	83.123.000
	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil (Terdata Usaha)	700	Unit Usaha	372.999.850	Jumlah Unit Usaha Kecil (Terdata Usaha)	700	Unit Usaha	361.974.850
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	120	Unit Usaha	185.999.250	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	120	Unit Usaha	105.527.000
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	20	Unit Usaha	100.000.000	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	20	Unit Usaha	96.800.000
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50	Unit Usaha	36.428.350	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50	Unit Usaha	36.428.350
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	10	Unit Usaha	192.300.000	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	10	Unit Usaha	147.300.000
						Persentase SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan	0,136	Persen	659.202.950
						Jumlah SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan	200	Orang	659.202.950

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pendanaan	
			Angka	Satuan				Angka	Satuan		
	Perizinan Bausaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	300	Unit Usaha	27.380.700	Perizinan Bausaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	300	Unit Usaha	24.580.700	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Menengah	0,12	persen	5.048.602.900	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Pertumbuhan UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor	2,29	persen	4.320.426.600	
	<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	Jumlah UMKM yang dikembangkan usahanya melalui promosi dan pemasaran Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	29	Unit	5.048.602.900	<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor	185	Unit usaha	4.320.426.600	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	600	Unit Usaha	3.630.318.200	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200	Unit Usaha	2.953.517.900	
	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	30	Unit Usaha	456.142.000	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	15	Unit Usaha	537.335.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terasilitasi	2	Lembaga	274.572.700	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terasilitasi	1	Lembaga	252.153.700	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasaha yang Difasilitasi)	153	Orang	524.570.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasaha yang Difasilitasi)	70	Orang	486.420.000	
						Persentase UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha	1,945	persen	91.000.000		
						Jumlah UMKM yang mendapat layanan pendampingan usaha	3.015	Unit usaha	91.000.000		
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	7	Unit Usaha	163.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	4	Unit Usaha	91.000.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>			<b>27.864.866.313</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>			<b>25.899.941.603</b>	

# PENUTUP

## BAB IV

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan evaluasi Renja Tahun 2025 sampai Triwulan I sebagai acuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Pegawai Dinas Koperasi dan UKM serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Pangkalpinang, 03 Juni 2025

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



  
EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19700926 199703 1 007